



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Reses ke-	: <b>IV (empat)</b>
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: <b>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Kamis, 18 Maret 2021.</b>
Pukul	: <b>13.00 – Selesai</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (fisik dan virtual menggunakan Zoom)
Pimpinan Rapat	: Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persiapan Pembukaan Pembelajaran Tata Muka Sekolah di Bulan Juli</li><li>2. Persiapan Vaksinasi Guru, Murid dan Mahasiswa</li><li>3. Persiapan Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN)</li><li>4. Pelaksanaan PPDB dan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2021</li><li>5. Lain-lain</li></ol>
Hadir Komisi X DPR RI	: 39 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Nadiem Anwar Makarim</b> - Mendikbud RI</li><li>2. <b>Prof. Ainun Naim, Ph.D</b> (Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI)</li><li>3. <b>Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D</b> – Dirjen Pendidikan Tinggi</li><li>4. <b>Dr. Iwan Syahril, Ph.D</b> – Dirjen Guru dan Tendik Kemendikbud RI</li><li>5. <b>Jumeri, S.TP., M.Si.</b> - Dirjen PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud RI</li><li>6. <b>Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D.</b> – Dirjen Pendidikan Vokasi</li><li>7. <b>Totok Suprayitno, Ph.D.</b> – Plt.Ka.Balitbang Perbukuan Kemendikbud RI</li><li>8. <b>Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D</b> (Staf Ahli Mendikbud)</li></ol>

## I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.19 WIB oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian MPP, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Mendikbud RI telah menyampaikan paparan dan informasi dengan beberapa poin utama antara lain:

1. Terhadap pelaksanaan vaksinasi pendidikan dan tenaga kependidikan, Kemendikbud RI akan melakukan program vaksinasi bagi pendidik, tenaga kependidikan dan dosen untuk semua jenjang dan satuan pendidikan baik negeri maupun swasta termasuk pendidikan keagamaan dan pendidikan informal dan non formal. Total 5.582.875 pendidik dan tenaga kependidikan akan divaksinasi dengan target penyelesaian vaksinasi akhir Juni 2021;
2. Terhadap persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dengan catatan sebagai berikut :
  - a. Sebelum vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan, berdasarkan SKB Empat Menteri (Kemendikbud RI, Kemenag RI, Kemendagri RI dan Kemenkes RI) Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi COVID-19, Pemda telah didorong untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan kondisi satuan pendidikan;
  - b. Setelah vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan wajib memberikan opsi layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas kepada orang tua, sehingga peserta didik dapat memilih untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
3. Terhadap persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional (AN), Kemendikbud RI melakukan Rakor, sosialisasi, pelatihan teknis dan persiapan AN pada bulan Januari sampai Maret 2021. Simulasi AN di satuan pendidikan secara terbatas pada bulan April – Agustus 2021. Adapun Pelaksanaan AN akan dilaksanakan pada bulan September – Oktober 2021 dan pengumuman laporan hasilnya pada bulan Desember 2021.
4. Terhadap Pelaksanaan PPDB dan Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2021 terdapat catatan sebagai berikut:
  - a. Ada beberapa aspek perbedaan PPDB pada tahun 2020/2021 dengan tahun ajaran 2021/2022 yaitu, (1) pelibatan sekolah swasta, (2) jalur afirmasi untuk penyandang disabilitas, (3) seleksi PPDB untuk SMK dan (4) proporsi jalur PPDB pada jenjang SD, (5) ketentuan zonasi (minimal 50%) dibuat lebih jelas;
  - b. Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2021 akan dilakukan dengan 3 jalur yaitu, Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN) dan Seleksi Mandiri.

Pengumuman pendaftaran SNMPTN pada tanggal 11 – 25 Februari 2021 dan pengumuman hasil pada tanggal 22 Maret 2021. Adapun pengumuman pendaftaran UTBK (I/II) dan SBMPTN pada tanggal 15 Maret – 2 Mei 2021 dan pengumuman hasilnya pada tanggal 14 Juni 2021.

5. Kemendikbud mengeluarkan Program Merdeka Belajar Edisi VIII, yaitu SMK Pusat Unggulan. Terdapat enam dukungan dalam program SMK Pusat Unggulan sebagai berikut, (1) Penguatan SDM SMK Pusat Keunggulan, (2) Pembelajaran Kompetensi Siap Kerja dan Berkarakter, (3) Penguatan Belajar Praktik Peserta Didik, (4) Manajemen Sekolah Berbasis Data, (5) Pendampingan oleh Perguruan Tinggi dan (6) Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah.
  6. Skema KIP Kuliah pada tahun 2021 akan diubah dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:
    - a. Unit *cost* tidak lagi seragam untuk prodi akreditasi A, B, dan C. Unit *cost* besaran biaya pendidikan untuk penerima baru program KIP Kuliah ditentukan berdasarkan nilai akreditasi program studi dari masing-masing mahasiswa penerima;
    - b. Besaran bantuan biaya hidup (*living cost*) penerima KIP Kuliah diatur ditetapkan berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal dari masing-masing wilayah Perguruan Tinggi (dibagi dalam 5 klaster daerah).
- B. Terhadap paparan dan penjelasan yang telah disampaikan, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Mendorong Pemerintah untuk segera menuntaskan vaksinasi kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan guna menunjang rencana sekolah dan kampus menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas;
  2. Mendesak Kemendikbud RI untuk memastikan satuan pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas memiliki sarana prasarana yang dituntut sesuai protokol kesehatan khusus pandemi COVID-19 dengan memastikan sumber pembiayaannya;
  3. Menekankan Kemendikbud RI dalam pelaksanaan Asesmen Nasional perlu dilakukan penyesuaian dengan seluruh kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan standar nasional pendidikan, serta menyusun juklak/juknis yang sederhana dan informatif;
  4. Mendorong Kemendikbud RI untuk melakukan sosialisasi kebijakan pendidikan secara komprehensif dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, sehingga kebijakan dapat diimplementasi sesuai dengan kondisi daerah, khususnya kebijakan PPDB, agar Pemda diberikan kebebasan menentukan zonasinya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan geografisnya;
  5. Mendorong Kemendikbud RI memastikan adanya materi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru guna menangkal faham radikalisme, liberalisme, kapitalisme, komunisme dan ideologi transnasional lainnya;
  6. Mendorong Kemendikbud RI memastikan pendaftaran SNMPTN secara daring yang dikelola oleh Lembaga Test Masuk Perguruan Tinggi (LTMP) memiliki panduan yang lengkap dan jelas sehingga calon

mahasiswa tidak dirugikan karena kesalahan input data; serta menjamin penyelenggaraan SNMPTN mematuhi protokol kesehatan pandemi Covid-19;

7. Komisi X DPR RI mengapresiasi dua kebijakan strategis Kemendikbud RI dalam Program Merdeka yaitu Program SMK Pusat Keunggulan sebagai kebijakan Merdeka Belajar Episode VIII dan perubahan ketentuan KIP Kuliah dengan tetap memperhatikan perlunya evaluasi secara terus menerus dalam implementasinya;
8. Menekankan Kemendikbud RI agar persiapan dan implementasi SMK Pusat Keunggulan memperhatikan aspek pemerataan bagi daerah urban, rural dan 3 T;
9. Mendorong Kemendikbud RI memastikan agar pelaksanaan kebijakan dan program pada Tahun 2021 berdasarkan landasan hukum yang kuat, memiliki kajian akademik, disertai adanya skema manajemen informasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat dan mendengar masukan dari para pemangku pendidikan;
10. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan dan catatan anggota, paling lambat tanggal 1 April 2021.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.20 WIB

**MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN RI**



**Nadiem Anwar Makarim**

**KETUA RAPAT,**



**Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP**